

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)



TAHUN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana kerja dan Pendanaan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik Pemerintah maupun mitra kerja.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga Rancangan Akhir RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Tondano, Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Minahasa,

ALEXANDER W. MAMESAH, S.STP. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770430 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renja	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	31
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	37
BAB V PENUTUP.....	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rancangan Akhir RENJA didasarkan pada penjabaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Minahasa maupun Pemerintah Pusat, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada

pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah /daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028.
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa.
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa.

- q. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SATPOL PP Kab.Minahasa

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, PemerintahProvinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas yaitu menegakan Peraturan Perundang-undangan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Minahasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. MINAHASA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa s.d. tahun 2022 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Kabupaten Minahasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2020 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun Berjalan 2023						
					Target Renstra Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renstra Tahun 2022 Tahun n-2)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d 2023 (%)					
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)*		11*	
				Keg	Rp	Keg	Rp	Keg	Rp		Keg	Rp	Keg	Rp	
1. 0 5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
1. 0 5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota					1 paket	2.746.024.961	1 paket	2.534.050.7 49		1 paket				

1. 0 5. 0 0 1.	2. 0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
1. 0 5. 0 0 1.	2. 0 1. 0 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
1. 0 5. 0 0 1.	2. 0 1. 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
1. 0 5. 0 0 1.	2. 0 1. 0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD													
1. 0 5. 0 0 1.	2. 0 1. 0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD													

1. 0 5. 0 0 1.	2. 0 1. 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD													
1. 0 5. 0 0 1.	2. 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
1. 0 5. 0 0 1.	2. 0 2. 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18 org	2.311.389.26 0	18 org	2.328.342.2 50	18 org	2.122.890.9 14						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya					1 paket	259.740.00 0	1 paket	259.740.00 0						
1. 0 5. 0 0 1.	2. 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														

1.05.001.	2.06.001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
1.05.001.	2.06.002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	4.798.904	1 paket	4.411.500					
		Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
1.05.001.	2.06.005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	2.500.000	1 paket	6.218.215	1 paket	5.003.500					
1.05.001.	2.06.009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 paket	34.516.000	1 paket	34.425.740					
1.05.001.	2.06.007.	Pengadaan Barang Milik Daerah													
1.05.001.	2.07.002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan												

1. 0 5. 0 1.	2. 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1. 0 5. 0 0	2. 0 8. 0 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		92 Lap	920.000	191 lap	1.910.000	191 lap	1.910.000						
1. 0 5. 0 1.	2. 0 8. 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Lap	31.344.700	1 paket	34.753.020	1 paket	34.553.720						
1. 0 5. 0 1.	2. 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1. 0 5. 0 1.	2. 0 9. 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													

1. 0 5. 0 1.	2. 0 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny		9 Unit Kend araa n	42.155.000	7 unit	74.320.000	7 unit	71.115.375						
1. 0 5.	0 2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
1. 0 5. 0 2.	2. 0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota														

1. 0 5. 0 0 2.	2. 0 1. 0 0 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah		9 Unit Kend araa n	42.155.000	2 kasus	27.750.000	2 kasus	27.750.000						
1. 0 5. 0 0 2.	2. 0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota														
1. 0 5. 0 0 2.	2. 0 2. 0 2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		12 Lap	7.117.600.00	12 lap	7.257.600.00	12 lap	7.156.800.00						
1. 0 5. 0 0 2.	2. 0 2. 0 3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota														

1. 0 5. 0 2.	2. 0 2. 0 3. 0	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam													

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2022 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 sesuai rencana.

Khusus untuk program peningkatan sumber daya manusia kami merasakan anggaran yang tersedia jauh dari ideal, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah S1 dan serendah rendahnya SLTA sederajat atau berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi Badan sekurang – kurangnya 165 cm untuk laki – laki dan 160 cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang – kurangnya 21 tahun;.
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

- a. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
- b. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
- c. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
- d. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);
- e. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Minahasa, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra unit kerjanya.

Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjejaran maupun Diklat Fungsional. Sehingga ke depan diharapkan ada perhatian yang lebih pada program peningkatan sumber daya manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Wilayah Kabupaten Minahasa yang begitu luasnya dimana terdiri dari 25 Kecamatan dan Desa / Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Minahasa, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Minahasa relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Disamping Dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Minahasa menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa :

Faktor Internal :

- a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil;
(adanya staf yang belum mengikuti latihan dasar Satpol);
- b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
- c. Sebagian besar anggota Satpol PP masih berstatus Honorer
- d. Masih perlunya penambahan Anggaran.

Faktor Eksternal :

- a. Masih banyaknya Pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan;
- d. Belum adanya Produk Hukum terkait TrantibumLinmas (Perda Trantibum);

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2023 harus mencapai persentase 80%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satpol PP.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keamanan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yg kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

- a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP;

- e. Mengadakan patroli dan melakukan koordinasi dengan kecamatan serta dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
- f. Monitoring dan evaluasi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Minahasa

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke -			Realisasi Capaian Tahun ke -			Rasio Capaian pada Tahun ke -		
			1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)	1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)	1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)
1.	Jumlah pelayanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat / Patroli (Patroli Kota)	100 %	145 kali	145 kali	145 kali						
	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Perda	4 Perda	4 Perda	4 Perda						

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Menumbuh kembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala Akhir dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.
- c. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dari Rancangan Akhir yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Di samping itu, dokumen Rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan Akhir RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4

Review terhadap Akhir RKPD/Renstra SKPD Tahun 2024

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.141.654.909					5.141.654.909	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP			2.927.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP			2.927.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	2.927.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	2.927.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	806.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	806.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	806.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	806.800	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	806.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	806.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	806.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	806.800	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	18 org	2.414.745.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	18 org	2.414.745.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	18 org	2.414.745.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	18 org	2.414.745.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		741.924.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		741.924.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1 paket	741.924.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1 paket	741.924.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		376.629.806	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		376.629.806	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Satpol PP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	123.367.997	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Satpol PP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	123.367.997	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Satpol PP	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga			Penyediaan peralatan rumah tangga	Satpol PP	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1.357.809	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1.357.809	
	Penyediaan bahan / material	Satpol PP	Jumlah Penyediaan bahan / material			Penyediaan bahan / material	Satpol PP	Jumlah Penyediaan bahan / material			
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	251.904.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	251.904.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		445.276.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		445.276.500	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah unit Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan			Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah unit Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan			

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Satpol PP	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	5 unit	420.579.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Satpol PP	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	5 unit	420.579.000	
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
	Pengadaan Meubel	Satpol PP	Jumlah paket Meubel yang disediakan	1 Paket	24.697.500	Pengadaan Meubel	Satpol PP	Jumlah paket Meubel yang disediakan	1 Paket	24.697.500	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36.764.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36.764.000.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Satpol PP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	200 lap	3.650.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Satpol PP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	200 lap	3.650.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Aaya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 lap	12.807.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Aaya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 lap	12.807.300	
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		290.870.000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		399.800.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.480.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.480.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	141.390.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	141.390.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat angkutan Dara Tak Bermotor	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat angkutan Dara Tak Bermotor			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat angkutan Dara Tak Bermotor	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat angkutan Dara Tak Bermotor			
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Rehabilitasi	1 unit	110.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Rehabilitasi	1 unit	110.000.000	

2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.022.687.994					5.022.687.994	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP			341.173.600	Penanganan kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP			341.173.600	
	Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Satpol PP	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	24 kasus	151.200.000.	Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Satpol PP	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	24 kasus	151.200.000.	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	24 kasus	89.232.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	24 kasus	89.232.000	

	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Trantibum	1 dokumen	100.741.600.00 0		Satpol PP	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Trantibum	1 dokumen	100.741.600.00 0	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				4.641.300.394					4.641.300.394	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah laporan hasil sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	1 Laporan	101.086.394	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah laporan hasil sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	1 Laporan	101.086.394	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah laporan hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12 laporan	4.500.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah laporan hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditangani	12 laporan	4.500.000.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditangani sesuai SOP	12 laporan	40.214.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditangani sesuai SOP	12 laporan	40.214.000	
	Pembinaan				40.214.000					40.214.000	

	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota										
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan TibumTranMas serta penegakan Perda/Perkada	1 Laporan	40.214.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan TibumTranMas serta penegakan Perda/Perkada	1 Laporan	40.214.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan MUSRENBANG tingkat Kabupaten bahwa tidak ada usulan masyarakat bagi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024
Kabupaten Minahasa

Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa memiliki program dan kegiatan masyarakat seperti terlihat pada tabel dibawah.

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Um	Minahasa			

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255 Ayat 1) : “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat”. Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 3 peran yaitu :

- a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan implementasi penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang.

Dari visi Kabupaten Minahasa “**Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera**” serta misi yang telah ditetapkan :

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Dalam dokumen perencanaan RENJA PD Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahunan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang melekatkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah apa yang akan dicapai dan dihasilkan.

Pada dasarnya tujuan RENJA ialah Suatu kondisi yang ideal yang ingin dicapai/dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Tujuan RENJA Perangkat Daerah SATPOL PP sebagai berikut :

Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-Undangan lainnya.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dan proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam waktu tertentu atau tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati seerta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku di seluruh Wilayah Kabupaten Minahasa.

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
Tujuan PD	Sasaran yang ingin dicapai
Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-Undangan lainnya.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati seerta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku di seluruh Wilayah Kabupaten Minahasa.

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tahun 2020 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

3.3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

3.3.1 RENCANA KEGIATAN INDIKATIF

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Daerah.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- h. Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- i. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
- j. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Minahasa

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode						Urusan /Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
						Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							13.136.122.909	
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5.141.654.909	
1	05	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>							8 Dok	
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Satpol PP	4 Dok	6.000.000	DAU		4 Dok	6.000.000
1	05	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Satpol PP	1 Dok	1.500.000	DAU		1 Dok	1.500.000
1	05	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Satpol PP	1 Dok	1.500.000	DAU		1 Dok	1.500.000
1	05	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Satpol PP	1 Dok	1.500.000	DAU		1 Dok	1.500.000
1	05	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Satpol PP	1 Dok	1.500.000	DAU		1 Dok	1.500.000

1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		14 bln				14 bln	
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Satpol PP		2.871.519.989	DAU			2.871.519.989
1	05	01	2	05		Administrasi Umum Kepegawaian Daerah	Jumlah Administrasi Umum Kepegawaian Daerah	Satpol PP		641.400.000	DAU			641.400.000
1	05	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Satpol PP	1 Paket	641.400.000	DAU		1 Paket	641.400.000
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP		207.170.920	DAU			207.170.920
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP						
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Satpol PP	1 Paket	134.848.920	DAU		1 Paket	134.848.920
1	05	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Satpol PP						
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Satpol PP	283 Dos	22.640.000	DAU		283 Dos	22.640.000
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Satpol PP	1 Paket	4.860.000	DAU		1 Paket	4.860.000
1	05	01	2	06	07	Penyediaan bahan / material	Jumlah bahan / material yang tersedia	Satpol PP						
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara	Satpol PP	46 Kali	44.822.000	DAU		46 Kali	44.822.000

1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP		973.000.000	DAU			973.000.000
1	05	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Satpol PP	1 Buah	403.200.000	DAU		1 Buah	403.200.000
1	05	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	Satpol PP	2 buah	469.800.000	DAU		2 buah	469.800.000
1	05	01	2	07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Satpol PP						
1	05	01	2	07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubel	Satpol PP	1 paket	100.000.000			1 paket	100.000.000
1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP						
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP		36.764.000	DAU			36.764.000
1	05	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	Satpol PP	100 lbr	2.000.000	DAU		100 lbr	2.000.000
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Aya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Aya Air dan Listrik yang tersedia	Satpol PP	1 Paket	34.764.000	DAU		1 Paket	34.764.000
1	05	01	2	08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Satpol PP						
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP		161.320.000	DAU			161.320.000
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	Satpol PP	1 Paket	38.480.000	DAU		1 Paket	38.480.000
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Satpol PP	1 Paket	161.320.000	DAU		1 Paket	161.320.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERAGKAT DAERAH

4.1 Rencana kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan gambaran Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Minahasa. Berikut adalah Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Minahasa seperti ditampilkan dalam table dibawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa

Kode						Urusan /Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kodisi Akhir Tahun	Rencana Kerja Tahun 2024		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					13.136.122.909
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.141.654.909
1	05	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			Satpol PP	8 dokumen	6.000.000
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan dokumen yang tersusun		Satpol PP	4 dokumen	6.000.000
1	05	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun		Satpol PP	1 Dokumen	1.500.000
1	05	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun		Satpol PP	1 Dokumen	1.500.000
1	05	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun		Satpol PP	1 Dokumen	1.500.000
1	05	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun		Satpol PP	1 Dokumen	1.500.000
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Satpol PP		
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		Satpol PP	18 orang	2.871.519.989
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Kepegawaian Daerah	Jumlah Administrasi Umum Kepegawaian Daerah		Satpol PP		641.400.000
1	05	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Satpol PP	1 Paket	641.400.000
1	05	01	2	05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		Satpol PP		207.170.920

1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP		-
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Satpol PP	1 Paket	134.848.920
1	05	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Satpol PP		
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	283 Dos	22.640.000
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	1 Paket	4.860.000
1	05	01	2	06	07	Penyediaan bahan / material	Jumlah Penyediaan bahan / material	Satpol PP		-
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Satpol PP	46 Kali	44.822.000
1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP		973.000.000
1	05	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	1 Buah	403.200.000
1	05	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Satpol PP	2 buah	469.800.000
1	05	01	2	07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Satpol PP		
1	05	01	2	07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubel	Satpol PP		100.000.000
1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP		
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP		36.764.000
1	05	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	Satpol PP	100 lbr	2.000.000
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Aaya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Aaya Air dan Listrik	Satpol PP	1 Paket	34.764.000
1	05	01	2	08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP		
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP		399.800.000
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	1 Paket	38.480.000
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	1 Paket	161.320.000
1	05	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat angkutan Dara Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat angkutan Dara Tak Bermotor	Satpol PP		
1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	1 Gedung	200.000.000

1	05	02				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7.994.468.000
1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Satpol PP		129.600.000
1	05	02	2	01	01	Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum		Satpol PP	864 Kali/thn	129.600.000
1	05	02	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Satpol PP		7.776.000.000
1	05	02	2	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Satpol PP		-
1	05	02	2	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Petugas yang melaksanakan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Satpol PP	216 org	7.776.000.000
1	05	02	2	03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Satpol PP		88.868.000
1	05	02	2	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS		Satpol PP	2 org	88.868.000

BAB V

PENUTUP

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tahun 2024 penyusunannya dilakukan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 – 2026.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Tondano, Maret 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MINAHASA

ALEXANDER W. MAMESAH, S.STP. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770430 199612 1 001